



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor : 2391 /KP.04.00/10/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama

30 Oktober 2017

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di
Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan kegiatan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka yakni Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Eselon II.a). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri.

Pengumuman seleksi terbuka dapat dilihat pada laman Mahkamah Konstitusi dan melamar secara *online* pada laman Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id mulai tanggal 24 Oktober s.d. 13 November 2017.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Prof. Dr. M. Guhtur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampiran Surat 1

Nomor : 2391 /KP.04.00/10/2017

Tanggal : 30 Oktober 2017

DAFTAR LAMPIRAN

I. SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

II. SEKRETARIS KEMENTERIAN DAN SETINGKAT KEMENTERIAN

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
4. Deputi SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia

III. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
2. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

IV. DEKAN

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Fakultas Hukum Universitas Batam
5. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
6. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
7. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
8. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
9. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
10. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
11. Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
12. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
13. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
14. Fakultas Hukum Universitas Jambi
15. Fakultas Hukum Universitas Jember
16. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
17. Fakultas Hukum Universitas Khairun

RE



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampiran Surat 2

Nomor : 2391 /KP.04.00/10/2017

Tanggal : 30 Oktober 2017

18. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
19. Fakultas Hukum Universitas Lampung
20. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
21. Fakultas Hukum Universitas Mataram
22. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
23. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
24. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
25. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
26. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
27. Fakultas Hukum Universitas Pancasila
28. Fakultas Hukum Universitas Pattimura
29. Fakultas Hukum Universitas Riau
30. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
31. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
32. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
33. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
34. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
35. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
36. Fakultas Hukum Universitas Tadulako
37. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
38. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
39. Fakultas Hukum Universitas Udayana
40. Fakultas Hukum Universitas Al Asyariah Mandar
41. Fakultas Hukum Universitas Musamus
42. Fakultas Hukum Universitas Papua

p r